BAB II

PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

2.1 Aktifitas Kegiatan Pelaksanaan PKL

Selama berlangsungnya Praktek Kerja Lapangan, penulis melakukan berbagai kegiatan berupa kegiatan yang sifatnya rutin (dilakukan hampir setiap hari kerja) dan kegiatan insedental (dilakukan pada waktu atau acara tertentu saja).

Berikut ini adalah jadwal pelaksanaan PKL yang telah penulis lakukan selama 1 bulan lebih, yakni mulai tanggal 05 juli 2010 s/d 05 Agustus 2010, adalah sebagai berikut :

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Keterangan	
			Rutin	insidental
1	Rabu , 17 juli 2013	Perkenalan dengan humas pegawai kejati.		✓
2	Kamis, 18 juli 2013	Dokumentasi kegiatan		✓
3	Jumat, 19 juli 2013	Penyuluhan Hukum Desa Sukajaya Di Kab Lembang		✓
4	Senin, 22 juli 2013	Kliping dan sharing	✓	
5	Selasa, 23 juli 2013	Kliping pers dan pengenalan hukum	✓	
6	Rabu, 24 juli 2013	Kliping pers	✓	
7	Kamis, 25 juli 2013	Mencatat surat masuk	✓	
8	Jumat, 26 juli 2013	Kliping pers dan print out data Kejati	✓	
9	Senin, 29 juli 2013	Mendistribusikan hasil kliping pers ke ruangan Asisten Intelejen	✓	
10	Selasa, 30 juli 2013	Kliping pers	✓	
11	Rabu , 31 juli 2013	Kliping pers dan mengantarkan ke ruangan Asisten Intelejen	✓	

12	Kamis, 1 agustus 2013	Merangkum kliping pers	✓	
13	Senin, 12 agustus 2013	Halal Bi Halal	✓	
14	Selasa, 13 agustus 2013	Penataan ruangan Intel		✓
15	Rabu, 14 agustus 2013	Mencari data pribadi di media cetak	✓	
16	Kamis, 15 agustus 2013	Sharing tentang hukum	✓	
17	Jumat, 16 agustus 2013	Persiapan 17 agustus		✓
18	Senin, 19 agustus 2013	Membuat brosur Kejati		✓
19	Selasa, 20 agustus 2013	Pengenalan Informasi Publik	✓	
20	Rabu, 21 agustus 2013	Memperbarui informasi Publik	✓	
21	Kamis, 22 agustus 2013	Membuat lapran bulanan	✓	
22	Jumat, 23 agustus 2013	Dekorasi ruangan intel dan kliping pers	✓	
23	Senin, 26 agustus 2013	Kliping pers	✓	
24	Selasa, 27 agustus 2013	Kliping pers	✓	

2.2 Deskripsi dan Contoh Kerja Rutin Selama PKL

Dalam melaksanakan praktek kerja lapangan (PKL) dihumas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Bandung, penulis melakukan aktifitas rutin yakni kegiatan yang dilakukan setiap hari pada saat bekerja dan dilakukan secara continue atau berulang-ulang, kerja rutin tersebut antara lain :

2.2.1. Kliping

Kliping merupakan kegiatan pengguntingan atau pemotongan bagian-bagian tertentu dari surat kabar, majalah atau sumber yang lain kemudian disusun dalam sistem tertentu dalam suatu bidang. Kliping sebagai salah satu sumber informasi dan pengetahuan penggunaannya belumlah semaksimal sumber yang lain misalnya buku. Padahal dari kliping juga bisa didapat sumber informasi dan pengetahuan yang tidak kalah pentingya bahkan bisa didapatkan berita terbaru[1].
Mendokumentasikan artikel atau berita dalam bentuk kliping

merupakan suatu kegiatan pokok yang rutin dilakukan oleh penulis setiap hari selama PKL. Yang pertama dilakukan ketika akan mengkliping adalah membaca koran, kemudian mencari suatu artikel yang beritanya berkaitan dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negri se-Jawa Barat. Artikel atau berita tersebut di dapat dari media cetak yaitu surat kabar lokal yang ada di Bandung. Seperti koran Kompas, Pikiran Rakyat, Republika, dan Dialog.

Setelah itu, artikel atau berita yang terkait dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negri se-Jawa Barat digunting, kemudian di tempelkan pada selembar kertas khusus yang telah disediakan bedasarkan nama koran,hari,tanggal,bulan, tahun, halaman, kolom dan topik.

Setelah mengkliping, kegiatan selanjutnya adalah merangkum dari isi artikel atau berita terkait dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negri se-Jawa Barat. Adapun definisi dari merangkum adalah menyusun garis besar isi bacaan dengan mengambil gagasan pokok dan menghilangkan gagasan penjelasnya[2].

Merangkum isi dari artikel atau berita yang terkait dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negri se-Jawa Barat juga merupakan suatu kegiatan rutin yang dilakukan oleh penulis selama PKL. Merangkum isi artikel atau berita dilakukan dikomputer. Dimana pada lembar word sudah tersedia kepala surat seperti ditujukan kepada Kepada Yth Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dari bagian Asisten Intelijen,nomor, tanggal, sifat, lampiran, dan perihal. Setelah isi rangkuman diketik kemudian di print untuk ditanda tangan oleh Kasi Penerangan Hukum dan Humas, kemudian ditanda tangan oleh Kasubsi Humas, dan terakhir di tanda tangan oleh Asisten Intelijen. Setelah merangkum artikel surat kabar maka kliping pers maka hasil kliping akan diserahkan ke ruang asisten intelijen.

2.2.2 Mendistribusikan Hasil Kliping Pers Keruang Asisten Intelijen

Definisi dari mendistribusikan adalah menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kpd beberapa orang atau ke beberapa tempat[3]. Mendistribusikan hasil kliping pers dilakukan setelah kliping dibuat. Pendistribusian tersebut diserahkan keruang Asisten Intelijen, untuk selanjutnya ditanda tangani oleh Asisten Intelijen selaku Jaksa Utama Pratama. Setelah ditanda tangani oleh Asisten Intelijen, keliping tersebut dijadikan bundel kliping pers surat kabar

harian lokal, yang kemudian ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

2.2.3 Deskripsi dan Contoh Kerja Insidental Selama PKL

Definisi dari kerja insidental adalah kegiatan yang terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, tidak secara tetap atau rutin.[4] Dan adapun kegiatan inseidental yang dilakukan penulis selama melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Kejaksaan Tinggi Jawa Barat diantarannya adalah sebagai berikut :

1.Perkenalan pegawai humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Pada saat hari pertama PKL, kegiatan yang dilakukan adalah perkenalan dengan para pegawai humas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Perkenalan adalah suatu kegiatan memperkenalkan pegawai humas KejaksaaN Tinggi Jawa Barat dengan mahasiswa yang akan melaksanakan PKL di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

2. Mencatat Surat Masuk.

Mencatat surat masuk adalah kegiatan menulis surat yang masuk kebagian penkum dan humas, yang kemudian disimpan didalam agenda untuk dijadikan sebagai arsip.

3. Mengantarkan surat.

Mengantar surat adalah suatu kegiatan memberikan surat dari bagian humas, untuk selanjutnya diberikan kepada bagian yang lain.

4. Meminta Bahan Wawancara.

Meminta bahan wawancara merupakan kegiatan meminta bahan sebagai acuan atau pedoman yang akan digunakan pada saat wawancara dilaksanakan.

Bahan wawancara tersebut disedikan oleh bagian sosial dan politik untuk wawancara yang dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan tinggi Jawa Barat.

2.4 Analisa Kegiatan Selama Praktek Kerja Lapangan

Sebagaiman dengan keilmuan ilmu komunikasi konsentrasi humas laporan kegiatan kerja peraktek yang di lakukan oleh penulis di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di tempatkan pada bagian Penerangan Hukum Hubungan Masyarakat. Keberadaan humas di perusahaan atau organisasi sangat penting karena menyangkut pencitraan yang baik sebuah perusahaan ataun organisasi. Keberadaan Humas begitu penting sebagai salah satu pewujud keberhasilan perusahaan.

Pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat posisi Humas memegang peranan penting dalam meningkatkan citra lembaga dan mengatur publik intern maupun extern. Kegiatan Humas Kejati Jabar dilaksanakan sesuai dengan PR-Excellence yang terbagi menjadi tiga macam yaitu berkaitan dengan komunikasi, Media dan penyuluhan kesadaran hukum.

❖ Komunikasi

Manusia tidak pernah terlepas dari yang namanya komunikasi. Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman. Bentuk umum komunikasi manusia adalah bentuk sinyal, bicara, tulis, gerakan dan penyiaran. Komunikasi dapat berupa interaktif, komunikasi transakti/transaktif, komunikasi bertujuan atau komunikasi tak bertujuan.

Melalui komunikasi, sikap atau perasaan seseorang atau sekelompok orang sikap dan perasaan dapat di pahami oleh orang lain. Akan tetapi, komunikasi akan

efektif apabila pesan yang disampaikan dapat di tafsirkan oleh penerima pesan tersebut. Di dalam kelompok atau organisasi itu selalu terdapat bentuk kepemimpinan yang merupakan masalah penting untuk kelangsungan hidup kelompok, yang terdiri dari pemimpin atau bawahan.

Diantara kedua pihak harus berada *two-way-communications* atau komunikasi dua arah atau komunikasi timbal balik , untuk itu perlu diadakanya kerja sama yang di harapkan untuk mencapai cita-cita, baik cita-cita pribadi, maupun kelompok, untuk mencapai tujuan oraganisasi. Kerja sama tersebut berbagai maksud yang meliputi hubungan sosial atau kebudayaan. Hubugan yang terjadi merupakan sutu proses adanya suatu keinginan masing-masing individu, untuk memperoleh keinginan hasil nyata.dan dapat memberikan manfaat bagi kehidupan yang berkelanjutan.

Kegiatan komunikasi dalam Humas Kejati Jabar di tunjukan kepada masyarakat yang berada di dalam organisasi (internal) dan masyarakat luar organisasi (eksternal). Komunikasi internal meliputi berbagai cara yang dapat di klasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu komunikasi personal / pribadi dan komunikasi kelompok. Yang penting dapat memberi pengertian komunikasi dalam Humas, sentral mempunyai peranan penting dalam pencapaian tujuan yang di tentukan.

Teknologi berkembang begitu pesat, sehingga interaksi antara anggota masyrakat semakin meningkat jangkauannya dan makin bertambah luas. Maka dari itu komunikasi tatap muka dan melalui media massa sekarang ini lebih di pakai secara terpadu guna mencapai efektifitas yang lebih tinggi. Sebuah

organisasi modern memiliki struktur yang kompleks dari berbagai ragam kegiatan khusus. Dengan komunikasi semuanya dapat di lakukan guna mencapai tujuan tersebut.

Memperhatikan peran pentingnya komunikasi itu dalam pelaksaanaa fungsi humas dalam organisasi secara keseluruhan, maka komunikasi bertindak yaitu berinteraksi dan mempengaruhi seluruhnya. Komunikasi di perlukan untuk organisasi bersatu dan berfungsi. Maka komunikasi adalah tanggung jawab dari setiap orang. Aliran melalui organisasi hanya bisa efektif, jika aliran antar pribadi-pribadi yang membangun organisasi itu efektif.

❖ Media

Media komunikasi yang penting di lakukan humas adalah dalam kemintraanya dengan media pers (cetak atau elektronik). Dimana Humas di Kejati Jabar mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemantauan berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat umum mengenai masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan Kejaksaan dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif di daerah, instansi pemerintah, media massa dan masyarakat. Dengan adanya media komunikasi ini komunikan dan komunikator tidak bertatap muka langsung walaupun berjarak dekat namun berbeda ruangan dan lain sebagainya.

Dalam kegiatan Humas di Kejati Jabar menjalani hubungan pers atau *Media Relations* yang baik dengan para pemimpin dan reporter / wartawan surat kabar, majalah, radio, dan televisi sangat penting untuk di lakukan, sebab anatar humas Humas dan media saling bergantungan dan tidak dapat di pisahkan masing-masing saling membutuhkan. Perlakuan yang berdasarkan *like* dan *dislike*

dalam memberikan keterangan dapat menimbulkan adanya berita-berita / tulisan yang tidak akuran, bahkan berita yang tidak benar tentang organisasi / perusahaan itu yang dapat membawa kerugian.

Hubungan media adalah aktifitas yang di lakukan individu ataupun profesi Humas suatu organisasi untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publisitas organisasi yang maksimal serta seimbang (*balance*). Dalam profesi humas hubungan media media juga sering dipahami sebagai penangan krisis dengan memberikan penanganan krisis dengan memberikan hal-hal yang positif tentang perusahaan yang sedang dilanda berita negatif. Pada saat krisis penanganan hubungan media oleh humas adalah dengan mengakui dan memperbaiki kesalahaan dengan menginformasikan usaha-usaha kedepan. Dalam hal ini baik media massa maupun Humas dalam posisi saling memanfaatkan atau saling diuntungkan (simbiosis mutualisme).

Kaitan Humas dengan pers / media massa harus tetap erat, karena humas tidak dapat meninggalkan pers sebagai sarana informasi publikasi Humas, sebaiknya pers membutuhkan informasi resmi, akurat dan lengkap, biasanya di dapatkan dari Humas. Secara tidak langsung Hubungan Humas dan pers saling ketergantungan dan membutuhkan satu sama lain sehingga terjalin hubungan yang bersifat simbiosis. Agar Humas sebagai sumber berita dapat dengan mudah dihubungi dan sebaliknya Humas tidak menemui kesulitan untuk menyampaikan informasi atau membantah / menetralisir berita yang dimuat media massa, maka penting sekali bagi Humas untuk selalu membina hubungan baik dengan pers.

❖ Penyuluhan Kesadaran Hukum

Landasan utama penyuluhan hukum adalah UUD 1945. Bertitik tolak dan penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Pernyataan ini merupakan kesepakatan bangsa Indonesia melalui wakilnya para pembuat UUD yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Guna mewujudkan pernyataan tersebut di atas, pasal-pasal UUD 1945 telah memberikan ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan, salah satu yang terpenting dalam hubungannya dengan penyuluhan hukum adalah pasal 27 ayat yang berbunyi : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pe-merintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan. Meningkatkan penyuluhan hukum untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat menyadari dan menghayati dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap rakyat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum sesuai UUD 1945. Penyuluhan hukum adalah usaha-usaha untuk meng-komunikasikan informasi mengenai hak-hak dan ke-wajiban warga negara yang telah diatur oleh hukum dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna memperluas penguasaan dan pengendalian sumber daya hukum rakyat sesuai dengan pancasila dan UUD 1945. Mengenai pola dasar penyuluhan hukum dan pola operasional penyuluhan hukum dimaksudkan untuk dijadikan pedoman secara garis besar dalam merencana-kan melaksanakan penyuluhan hukum secara terarah dan terpadu.

Penyuluhan Kesadaran Hukum ini merupakan salah satu tugas humas Kejati Jabar dimana humas memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat, sampai ke daerah-daerah untuk membimbing masyarakat taat hukum. Penyuluhan hukum merupakan salah satu instrument pembangunan yang sangat penting dan menjadi prasyarat untuk menumbuhkan kesadaran, perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam rangka penegakan hukum suatu negara demokrasi yang tertib hukum. Perlu kita sadari bahwa upaya untuk menciptakan kesadaran hukum bukan suatu hal yang sederhana, sebab hukum sebagai suatu produk sosial yang tidak nyata (intangible product) tidak semudah memasarkan sama dengan produk produk nyata (tangible product) yang bisa digunakan dan dinikmati hasilnya dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu format perencanaan komunikasi yang selama ini banyak dikaji dan dikembangkan oleh studi komunikasi pembangunan dapat diaplikasikan dalam penyuluhan hukum bagi masyarakat yang buta atau kurang memahami tentang hukum. Pola operasional penyuluhan hukum merumuskan metode penyuluhan hukum adalah suatu rakitan antara pendekatan, teknik dan sarana/media penyuluhan hukum.

Kejaksaan melakukan kegiatan penyuluhan hukum yang dipopulerkan dengan nama Jaksa Masuk Desa. Jangkauan utamanya ialah masyarakat pedesaan yang terpencil dari hubungan komunikasi dan transportasi pada umumnya. Mengingat sasaran kegiatan adalah masyarakat pedesaan yang awam/buta hukum maka teknik dan sistem pendekatan yang digunakan adalah pendekatan secara manusiawi dan kemasyarakatan dan bukan pendekatansecara teknis hukum.

Pada hakekatnya kegiatan ini tidak semata-mata ditujukan kepada warga Nmasyarakat di daerah, melainkan juga ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali aparat penegak hukum sendiri agar dalam melaksanakan tugasnya selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat masyarakat.Berbagai kegiatan penyuluhan hukum yang telah dilaksanakan, diantaranya penerangan tentang fungsi dan tugas pengadilan melalui brosur-brosur yang disebarluaskan ke daerah-daerah, penyuluhan pada masyarakat dalam bentuk ceramah, wawancara, di TV/RRI, radio swasta, tempat-tempat umum dan publikasi media cetak lainnya.

Dalam kegiatan Penyuluhan / Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) antusias masyarakat sangat besar. Bahkan masyarakat juga mengharapkan agar pelaksanaan Penyuluhan / Penerangan Hukum dalam lingkungannya dapat diulangi kembali. Dari hasil pengamatan dan evaluasi penyelenggaraan Penyuluhan / Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (BINMATKUM) yang diadakan selama ini telah dapat dibina kerjasama yang baik dan harmonis dengan instansi pemerintah yang terkait yang ada di Daerah Jawa Barat.

Keterpaduan ini secara terus menerus akan diusahakan untuk dapat dibina dan ditingkatkan dalam rangka penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat dalam mentaati dan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku karena program BINMATKUM adalah program Nasional dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Humas sebagai bagian dari manajemen perusahaan/organisasi, berorientasi pada aktivitas yang dilakukan oleh industri, perusahaan, perserikatan, organisasi sosial, atau jabatan pemerintah, untuk menciptakan dan memelihara hubungan yang sehat dan bermanfaat dengan maksud menyesuaikan dirinya pada keadaan sekeliling dan memperkenalkan diri pada masyarakat.

Humas mempunyai tugas menjadi "corong" atau publikasi kepada masyarakat agar citra organisasi tetap baik dan menjadi "mediator" yang menjembatani kepentingan organisasi / perusahaan dengan publiknya yang terkait dengan kegiatan Humas itu sendiri. Berbagai aktifitas Humas senantiasa menciptakan, menjaga dan meningkatkan citra yang positif.

Humas menyadari bahwa komunikasi yang baik dan etis serta hubungan manusiawi merupakan instrument dalam mengatasi hubungan yang tegang ataupun sampai tejadinya konflik. Hal ini terjadi karena adanya pengertian. Dan dengan komunikasi itu muncul adanya saling pengertian dan kepercayaan. Artinya mengakui bila ada kesalahan, kekeliruan, tetapi menyadari bahwa ada kemungkinan untuk mengadakan perbaikan demi perkembangan dan akan lebih menguntungkan semua pihak. Dalam hal ini jaminan yang terhandal ialah "saling adanya keterbukaan".

Dalam hal ini seorang Humas dibutuhkan bagi perusahaan (lembaga) guna membangun *image bulding*, karena Humas merupakan alat (fungsi) yang digunakan suatu organisasi dalam menciptakan harmoni atau keseimbangan hubungan (*relations*) antara manajemen dengan publiknya akibat adanya konsekuensi kepentingan kedua pihak yang muncul dalam beinteraksi, dalam

menciptakan harmoni ini Humas menggunakan komunikasi sebagai perangkat kerjanya, utamanya komunikasi yang sifatnya timbal balik dan mendorong terwujudnya saling pengertian dan kerjasama.

2.4.1 Analisa Humas

Humas adalah salah satu cabang Ilmu Komunikasi yang sangat penting. Setiap orang pasti melakukan fungsi humas baik untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain atau untuk kepentingan keluarga, kelompok, organisasi dan masyarakat.

Public relations merupakan sebuah ujung tombak dari perusahaan. Pada saat ini tidak ada organisasi yang tidak membutuhkan humas, karena salah satu fungsi dari PR adalah untuk menjaga image atau citra dari perusahaan. Oleh karena itu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menyadari akan pentingnya keberadaan humas dalam bagian perusahaan.

Adapun definisi dari Public Relations itu sendiri menurut Tony Greener adalah presentasi positif suatu organisasi kepada seluruh publiknya. Sedangkan menurut *The First World Forum Of Public Relations* " Public relations practise adalah seni dan ilmu pengetahuan mengenai proses menganalisis trends, memprediksi konsekuensi-konsekuensinya, memberikan konseling kepada pimpinan organisasi, dan mengimplementasikan program yang terencana yang akan melayani kepentingan organisasi dan publik." (Kriyantono, 2008 : 5)

Dalam definisi Public Relation seperti yang sudah disebutkan diatas, dapat kita ketahui bahwa Public Relation bukan hanya ujung tombak dari sebuah perusahaan yang salah satu fungsinya adalah untuk menjaga image atau citra dari sebuah perusahaan, tetapi humas juga dalam menjalankan kerjanya harus menganalisis mengenai masalah apa yang terjadi dalam perusahaannya. Tidak

hanya sampai disitu peran seorang humas diperlukan dalam organisasi suatu perusahaan, setelah menganalisa kasus yang terjadi dalam perusahaan tersebut, sebaiknya seorang humas mengambil tindakan yang terbaik bagi perusahaan tersebut dan memikirkan resiko (akibat) apa yang dapat timbul dari keputusan yang telah diambil. Sebagai seorang humas atau Public Relation yang baik, hendaknya seorang humas dapat mengetahui citra perusahaan di mata publik. Apabila citra perusahaan kurang baik di mata publik, maka seorang humas sekiranya dapat memberikan saran, dan masukan kepada pemimpin perusahaan untuk membuat strategi agar citra perusahaan tersebut menjadi baik di mata masyarakat atau publik. Karena setiap sesuatu yang bersangkutan dengan perusahaan harus mempunyaipersetujuan dari pimpinan perusahaan, selain itu seorang humas juga bertugas untuk menjalankan program yang sudah terencana.

Perkembangan masyarakat yang sangat kompleks ternyata diikuti oleh pertumbuhan dan perkembangan organisasi bisnis yang semakin membesar. Kondisi ini membawa satu konsekuensi terhadap bentuk relasi yang terjadi antara masyarakat sebagai salah satu stakeholdernya.

Dan dapat kita ketahui bahwa fungsi Public Relations menurut Cutlip dan Center adalah untuk menunjang kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi, menciptakan komunikasi dua arah secara timbal balik dengan menyebarkan informasi dari perusahaan kepada publik dan menyalurkan opini publik kepada perusahaan, melayani publik dan memberikan nasehat kepada pimpinan perusahaan untuk kepentingan umum, serta membina hubungan secara

harmonis antara perusahaan dan publik, baik internal maupun eksternal. (Kriyantono, 2008 : 5)

Dari definisi diatas dapat diartikan bahwa Public Relations juga dapat membantu kegiatan manajemen dan mencapai tujuan organisasi, karena keberhasilan praktisi humas dalam menjalankan tugasnya bergantung kepada kepiawaiannya dalam mempersuasi pihak manajemen unutk menjalankan tanggung jawab sosial dan mempersuasi masyarakat untuk percaya kepada organisasi bahwa mereka telah menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin. Dan seorang humas juga dapat menciptakan komunikasi dua arah antara perusahaan dan publik, dimana adanya feedback dari masyarakat kepada perusahaan yang berupa opini publik. Yang kemudian akan disampaikan oleh seorang humas kepada pimpinan perusahaan dan peran serta seorang humas dalam memberikan saran dan masukan kepada pimpinan perusahaan untuk kepentingan umum. Dan juga agar terbentuknya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan publik, baik publik eksternal maupun publik internal.

2.4.2 Analisa Kerja Humas

Perkembangan teknologi dan kondisi masyarakat yang semakin kompleks menjadi faktor penyebab yang membawa pengaruh sangat besar terhadap PR.

PR merupakan suatu konsep dasar yang menjadi arah acuan yang berhubungan dan bertanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara perusahaan dengan masyarakat atau publiknya dapat menciptakan interaksi positif yang pada ujungnya akan

bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dan PR menjadi dibutuhkan disuatu instansi pemerintah atau perusahaan swasta karena relasi dan interaksi merupakan satu kebutuhan penting dalam kehidupan bisnis dan organisasi yang ada dimasyarakat. Hal tersebut tidak dapat dipungkiri oleh setiap instansi pemerintah atau perusahaan swasta karena komunikasi dan interaksi yang dilakukan suatu instansi atau perusahaan akan menentukan keberhasilan serta kemajuan instansi atau perusahaan swasta tersebut.

Organisasi atau perusahaan pasti selalu berhubungan dengan khalayaknya. Namun praktisi humas pada saat ini sudah harus memfokuskan pekerjaannya pada khalayak tertentu saja. Khalayak humas, yaitu kelompok atau orang-orang yang berhubungan atau berkomunikasi dengan perusahaan, baik khalayak internal maupun eksternal.

Dan adapun ruang lingkup pekerjaan humas mencakup enam bidang pekerjaan yaitu : 1. Publisitas. 2. Pemasaran. 3. Public Affair. 4. Manajemen Isu. 5. Lobi. 6. Hubungan Investor. Seluruh bidang pekerjaan humas tersebut telah menghasikan spesialisasi kehumasan yang bersifat khusus. (Morissan, 2008 : 3132)

PR mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu perusahaan atau suatu institusi. Ke-urgen-an PR dalam suatu organisasi, perusahaan atau instansi ini sangat mempengaruhi tugas PR itu sendiri. Secara garis besar, tujuan PR itu menyangkut 3 hal yaitu :

1. Reputasi dan citra. Tugas PR tidak dapat lepas dari reputasi dan citra, dengan asumsi bahwa citra yang positif akan berkaitan

dengan semakin tingginya akses publik terhadap „output‟ dari perusahaan tersebut.

2. Jembatan komunikasi. PR menjadi komunikator dan mediator organisasi dengan lingkungannya.
3. „Mutual benefit relationship‟ , yaitu PR harus menjamin kepada publik bahwa perusahaan berada didalam operasinya memiliki niat baik dalam berbisnis yang diwujudkan dalam tanggung jawab sosial dan diekspresikan melalui hubungan yang saling menguntungkan diantara perusahaandapubliknya.(Darmastuti, 2007 : 16)

2.4.3 Analisa Kerja Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Dalam ruang lingkup pekerjaan humas, humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat termasuk ke dalam spesialisasi Public Affair. Karena ruang lingkup pekerjaan humas Public Affair melahirkan tiga bidang kekhususan, salah satunya adalah *Government Relations. Government Relations* yaitu khusus terfokus dalam hubungannya dengan aparat pemerintahan. Lembaga tertentu memiliki unit ini karena mereka banyak melakukan proyek yang harus terus menerus bekerja samaatau berkoordinasi dengan pemerintah. (Morissan, 2008 : 31-32)

Kegiatan kehumasan dapat dilaksanakan dalam berbagai situasi (Setting). Walaupun prinsip-prinsip humas berlaku untuk seluruh organisasi atau perusahaan namun pekerjaan atau tugas praktisi humas dapat bervariasi tergantung pada situasi yaitu jenis organisasi atau perusahaan dimana praktisi humas bekerja. Dalam hal ini organisasi atau perusahaan terbagi atas dua jenis

dilihat dari tujuan organisasi atau perusahaan bersangkutan yaitu : organisasi profit dan organisasi nonprofit. (Morissan, 2008 : 85)

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat termasuk dalam organisasi nonprofit. Karena organisasi nonoprofit didirikan untuk mencapai tujuan yang bersifat nonbisnis atau tidak mencari keuntungan, dalam organisasi nonprofit dibagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi nonprofit pemerintah dan organisasi nonprofit bukan pemerintah. Dalam penggolongan tersebut Kejaksaan Tinggi Jawa Barat termasuk dalam golongan organisasi nonprofit pemerintah.Karena kegiatan operasionalnya dibiayai oleh pemerintah atau negara.

Humas pada organisasi pemerintah berfungsi untuk membantu menjelaskan kegiatan yang dilakukan organisasi bersangkutan kepada masyarakat. Dan sebaliknya menerima umpan balik yang diberikan masyarakat dan menyampaikan kepada pimpinan organisasi. (Morissan, 2008 : 90)

Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memiliki tugas pokok yaitu melakukan penyiapan dan pemantauan berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat umum mengenai masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan Kejaksaan dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislatif di daerah instansi pemerintah, mass media, dan masyarakat. Adapun kegiatan eksternal yang dilakukan oleh humas Kejati Jabar adalah kegiatan penerangan hukum ke daerah-daerah. Dimana kegiatan tersebut menerangkan tentang penyuluhan hukum kepada masyarakat daerah yang belum mengetahui tentang hukum.

Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat berada di bagian Asisten Intelejen, yang kemudian berada di bawah bagian penerangan hukum dan humas.

Kasi penerangan hukum dan humas dipimpin oleh Suryo Atmono, S.H. Dan dalam Kasubsi Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Yeni Sulastri,S.H. Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mempunyai peranan yang penting dalam perusahaan. Karena citra perusahaan dijaga oleh seorang humas, oleh karena itu humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjaga hubungan baik dengan para wartawan, dan masyarakat atau publik.

Kegiatan internal adalah kegiatan yang dilakukan oleh humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang aktifitasnya menyangkut kegiatan yang akan dilaksanakan bersama orang-orang dalam perusahaan. Adapun kegiatan internal yang dilaksanakan adalah :

1. Membuat kliping pers dan mendistribusikannya ke ruang asisten intelijen.
2. Mencatat surat masuk yang ditujukan kepada humas kejaksaan tinggi jawa barat.
3. Pengajian rutin yang dilakukan, sebagai kegiatan siraman rohani yg dilakukan bersama para pegawai atau karyawan kejaksaan tinggi jawa barat.

Kegiatan eksternalnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh humas kejaksaan tinggi jawa barat yang aktifitasnya menyangkut kegiatan yang dilaksanakan bersama orang-orang dalam perusahaan untuk masyarakat atau publik. Dan kegiatan eksternal yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengikuti acara PORDA.
2.Melaksanakan program BINMATKUM secara efektif dan efisien sebagai upaya penigkatan kualitas kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat.

2.4.4 Analisa Pelayanan Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Kepada Mahasiswa PKL

Pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain dan menyediakan kepuasan pelanggan.[5]

Dari definisi diatas maka hal penting dari pelayanan yang pertama adalah interaksi langsung, dan yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Karena dari interaksi yang terjadi antara seseorang dengan orang lain, dapat menimbulkan kepuasan tersebut. Pelayanan yang diberikan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat terhadap penulis sangat baik. Selama melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, penulis merasa beruntung mendapatkan kesempatan, karena pada hari pertama melakukan PKL penulis diperkenalkan oleh pegawai humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, penulis merasa nyaman dengan sambutan yang ramah dari para pegawai humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan karyawan-karyawan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di bagian lainnya.

Kesempatan itu telah memberikanan pengalaman bagi penulis, khususnya mengenai Praktek kerja Humas perusahaan dan umumnya mengenai pengaplikasian teori dan praktek yang didapat mahasiswa selama perkuliahan terhadap lingkungan perusahaan.

Penulis juga sering mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari pembimbing PKL. Khususnya dalam membuat kliping pers, penulis juga diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan itu acara yang dilaksanakan di

lingkungan perusahaan. Hasil kerja praktek ini memberikan suatu pemahaman yang berarti bagi penulis tentang bagaimana sistematika kerja humas dalam perusahaan.